

**STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DINAS PENGADAAN
ANGKATAN LAUT**

Disusun oleh:

NAMA : YUDI HANDOKO,S.T.
NPM : 1864007014
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Yudi Handoko, S.T.
NPM : 1864007014
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Standar Kompetensi Personil Dinas Pengadaan Angkatan
Laut
Judul Tesis : Personnel Competence Standard Of The Navy Procurement
Services

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing Tesis I,



Dr. Asropi, M.Si.

Pembimbing Tesis II,



Dr. Ansori, S.Si., M.Si., SH., MH

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : YUDI HANDOKO, S.T.
NPM : 1864007014
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
JUDUL TESIS : STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DINAS
PENGADAAN ANGKATAN LAUT

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Juli 2021
Pukul : 10.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. R. Luki Karunia., SE., Ak., MA (.....)

Anggota : Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd (.....)

Pembimbing I : Dr. Asropi, M.Si (.....)

Pembimbing II : Dr. Ansori, S.Si., M.Si., SH., MH (.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUDI HANDOKO
NPM : 1864007014
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tat tertib di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Jakarta, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



YUDI HANDOKO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridhoNya, sehingga tesis dengan judul **“Standar Kompetensi Personil Dinas Pengadaan Angkatan Laut”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini dipilih penulis karena ketertarikan dan kepedulian penulis terhadap peningkatan kinerja, kompetensi dalam bidang pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di lingkungan TNI Angkatan Laut, disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, yaitu kepada yang terhormat :

1. Dr. Asropi, M.Si. dan Dr. Ansori, S.Si., M.Si., SH., MH sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
2. Orang tua, Istri dan Anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material serta do'a dalam penyusunan tesis ini.
3. Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut beserta staf dan rekan-rekan peneliti yang telah membantu dalam pelaksanaan eksperimen dan penyusunan laporan tesis ini.
4. Bapak Suradi Politeknik STIA LAN yang selalu memberikan dukungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Poltek STIA LAN.
5. Semua pihak yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada tesis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut pada penelitian selanjutnya. Sangat Besar harapan kami laporan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2021

Penulis



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PROGRAM MAGISTER SCIENCE ADMINISTRATION
HIGH SCHOOL of ADMINISTRATION SCIENCE
STATE ADMINISTRATION INSTITUTION
CIVIL SERVANTS RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM**

ABSTRACT

YUDI HANDOKO, 1864007014

PERSONNEL COMPETENCE STANDARD OF THE NAVY PROCUREMENT SERVICES

100 Pages, V Chapter, 10 Tables, 12 Figures, 9 Appendices

Bibliography: 13 Books, 5 Journals, 1 Report, 7 Rules and others.

The current condition of the Procurement Agency's organizational structure is filled with various human resources sources without regard to the competency of the personnel concerned with the duties and responsibilities of their positions.

Administrative errors in writing the minutes of procurement of goods / services show the weakness of human resources owned by an agency, the procurement treatise is a very important part in a procurement process. What is the standard of competence of the Navy Procurement Services personnel in managerial, social cultural and technical?

The thesis on the competency standard of the Navy Procurement Service personnel aims to prepare a draft of the competency standards that must be possessed by the Navy personnel especially those who work in the Procurement Service. The preparation of the Final Project on competency standards for Navy Procurement Service personnel is expected to be used as a reference or basis for the drafting of the Indonesian Navy Cheaf of staff Provisions regarding Navy Procurement Service personnel policies.

Spencer and Spencer (1993: 9) state that competencies are the basic foundation of people's characteristics and identify ways of behaving or thinking, equating situations, and supporting for long periods of time.

This research is a qualitative research with a descriptive-qualitative approach and data collection techniques are interview, document review and observation which researcher use to describe the competence of the Navy Procurement Services personnel in three competence cluster which are managerial, social cultural and technical.

From Research result researcher can draw conclusions that competence standard of the Navy Procurement Services devided by three cluster which are managerial, social cultural and techniques.

From analysis result, researcher will add several feedback to Indonesian Navy about the personnel competence especialy whom work in the procurement generaly. And researcher found that the Indonesian Navy needs to developed the competence dictionary.

Keywords: *Competence, Standard, Procurement, descriptive-qualitative, Behavioral Event Interview, Thematic-analysis*

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
POLITEKNIK STIA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRAK

YUDI HANDOKO, 1864007014

**STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DINAS PENGADAAN ANGKATAN
LAUT**

100 Halaman, V Bab, 10 Tabel, 12 Gambar, 9 Lampiran

Daftar Pustaka: 13 Buku, 5 Jurnal, 1 Laporan, 7 Peraturan Perundang-undangan.

Kondisi saat ini struktur organisasi Badan Pengadaan diisi dengan berbagai sumber daya manusia tanpa memperhatikan kompetensi personil yang bersangkutan dengan tugas dan tanggung jawab posisi mereka.

Kesalahan administrasi secara tertulis berita acara pengadaan barang / jasa menunjukkan kelemahan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu lembaga, risalah pengadaan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengadaan. Apa standar kompetensi personel Layanan Pengadaan Angkatan Laut dalam hal manajerial, sosial budaya dan teknis?

Tesis tentang standar kompetensi personel Layanan Pengadaan Angkatan Laut bertujuan untuk menyiapkan rancangan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh personel Angkatan Laut terutama mereka yang bekerja di Layanan Pengadaan. Penyusunan Tugas Akhir tentang standar kompetensi untuk personel Layanan Pengadaan Angkatan Laut diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau dasar untuk penyusunan Ketentuan Staf Angkatan Laut Indonesia mengenai kebijakan personil Layanan Pengadaan Angkatan Laut.

Spencer dan Spencer (1993: 9) menyatakan bahwa kompetensi adalah fondasi dasar karakteristik orang dan mengidentifikasi cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk jangka waktu yang lama.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, telaah dokumen, dan observasi yang digunakan peneliti untuk menggambarkan kompetensi personel Jasa Pengadaan Angkatan Laut dalam tiga gugus kepatuhan yaitu manajerial, sosial budaya dan teknis.

Dari hasil Penelitian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa standar kompetensi Layanan Pengadaan Angkatan Laut dibagi oleh tiga klaster yaitu manajerial, sosial budaya dan teknik.

Dari hasil analisis, peneliti akan menambahkan beberapa umpan balik kepada Angkatan Laut Indonesia tentang kompetensi personel yang bekerja di pengadaan secara umum. Dan peneliti menemukan bahwa Angkatan Laut Indonesia perlu mengembangkan kamus kompetensi.

Kata kunci: Kompetensi, Standar, Pengadaan, *descriptive-qualitative*, *Behavioral Event Interview*, *Thematic-analysis*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	 1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
1. Akademis	18
2. Praktis	19
 BAB II KERANGKA TEORI	 20
A. Tinjauan Teori	20
1. Standar	20
2. Kompetensi	22
3. Manajemen Pengadaan	39
B. Konsep Kunci	53
C. Model Berfikir	53
D. Pertanyaan Penelitian	53
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 54
A. Fokus Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Wawancara	57
2. Observasi	60
3. Telaah Dokumen	61
D. Teknik Pengolahan Data	61
E. Teknik Analisis Data	62
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Hasil Wawancara	66
C. Hasil Observasi	80
D. Hasil Penelitian	94
1. Kompetensi Manajerial	94
2. Kompetensi Sosial Kultural	94
3. Kompetensi Teknis	95

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
1. Kompetensi manajerial	96
2. Kompetensi sosial kultural	96
3. Kompetensi teknis	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tabulasi Wasrik Itjenal di Disadal	13
Tabel 1.2.	Jawaban Surat Tim Wasrik BPK RI	14
Tabel 1.3.	Daftar Personil Bersertifikat/Tidak Bersertifikat	16
Tabel 3.1.	Key Informan	61
Tabel 4.1.	Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pengadaan	83
Tabel 4.2.	Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Dinas Pengadaan Alat Utama	84
Tabel 4.3.	Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Siap Pengadaan Alat Utama	85
Tabel 4.4.	Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Dinas Pengadaan Dalam Negeri	87
Tabel 4.5.	Deskripsi Indikator Perilaku	89
Tabel 4.6.	Identifikasi Kompetensi	94

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	PT PAL Indonesia merupakan Industri Pertahanan	5
Gambar 1.2.	KRI dalam proses pembangunan Kapal	8
Gambar 2.1.	Gunung Es Kompetensi.....	31
Gambar 2.2.	Bagan Pola Pikir	55
Gambar 4.1.	Susunan Organisasi Disadal	68
Gambar 4.2.	Tugas dan Fungsi Dinas Pengadaan Angkatan Laut.....	69
Gambar 4.3.	Mekanisme Alur Pengambilan Data dengan Behavioral Event Interview.....	71
Gambar 4.4.	Pengujian Crash Stop KRI Tarakan-905	72
Gamabr 4.5.	Kapal LPD melaksanakan circular turning test	74
Gamabr 4.6.	Senjata KRI Kurau-856 pinjaman dari KRI Cakalang-852	80
Gambar 4.7.	Kapal FOCP dalam perbaikan	81
Gambar 4.8.	Proses Negosiasi Pengadaan Kapal antara TNI AL dan PT PAL	82

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kamus Kompetensi Manajerial
Lampiran 2	Kamus Kompetensi Sosial Kultural
Lampiran 3	Kamus Kompetensi Teknis
Lampiran 4	Pedoman Telaah Dokumen
Lampiran 5	Pengolahan Hasil Telaah Dokumen
Lampiran 6	Pedoman Wawancara
Lampiran 7	Transkrip Wawancara



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengembangan personel dan alutsista TNI saat ini disesuaikan dengan kemampuan operasi nonperang atau pertahanan nirmiliter seperti penanganan bencana alam. Kapabilitas personel dan alutsista bisa dialih fungsikan secara cepat untuk operasi keselamatan umum mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya. Panglima tengah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan sumber daya manusia (SDM) TNI untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan. Keputusan tersebut dilandasi sistem merit yang merupakan kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. TNI memerlukan cetak biru pengembangan SDM berkualitas. Pengembangan postur SDM TNI yang modern dan profesional mendesak guna mengantisipasi perubahan tatanan global dan dinamika nasional. Pengembangan SDM TNI searah dengan doktrin bela negara yang terus diperbarui.

Dalam konteks sekarang bela negara adalah sikap dan tindakan warga dijiwai kecintaan tanah air. Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa, dan bernegara. Kemudian percaya akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta menjaga kedaulatan wilayah. Untuk menjawab tantangan ke depan perlu mengaktualisasikan bentuk-

bentuk konkret bela negara sesuai dengan tantangan zaman. Karena tantangan dan bentuk ancaman terhadap negara telah berubah. Tantangan tak hanya berupa ancaman perang dengan senjata dan perang asimetrik lainnya, tetapi juga mengatasi dampak bencana alam. Contoh, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir dan longsor. Bahkan juga untukantisipasi dan penanganan polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Contoh, operasi Citarum Harum untuk mengatasi pencemaran sungai Citarum. Maka, SDM TNI mesti belajar ilmu lingkungan sungai serta pengolahan sampah.

Perlu strategi pengelolaan SDM sebagai sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Kondisi sekarang menuntut TNI secepatnya membangun SDM masa depan didukung sistem pembinaan jati diri. Melihat tantangan global dan revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan, diperlukan transformasi sistem pendidikan TNI yang lebih adaptif dimulai dari proses perekrutan. Rekrutmen SDM harus terpadu, sehingga dalam pelaksanaan rekrutmen calon taruna Akademi Militer memiliki kualitas dengan standar sesuai dengan perkembangan iptek mutakhir bidang teknologi yang menjadi pilar Industri 4.0. Kemudian, harus menumbuhkan spirit mengembangkan alutsista dan industri pertahanan serta mengembangkan secara progresif SDM sesuai dengan rencana strategis. Saatnya meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi pertahanan. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ketersediaan peralatan pertahanan dan keamanan selama ini belum didukung

kemampuan industri secara optimal. Ini menyebabkan ketergantungan pada produk pertahanan luar negeri. Industri pertahanan meliputi alat utama, komponen utama, pendukung (perbekalan), dan bahan baku. Saat ini dibutuhkan SDM yang menguasai teknologi pertahanan untuk menerapkan visi bagi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan. SDM yang kapabel, sehingga mampu mendukung kemajuan teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk merumuskan cetak biru pengembangan SDM perlu dibentuk *task force* yang memiliki kredibilitas dan kompetensi pertahanan ke depan. Dalam rencana strategis, pertahanan negara dinyatakan bahwa SDM TNI sebagai komponen utama harus disiapkan dari segi pemenuhan personel di tiap matra, pelaksanaan latihan, dan pendidikan keterampilan agar profesional dalam pelaksanaan tugasnya baik berupa kegiatan maupun yang bersifat operasi. Namun, tuntutan kompetensi dan profesionalitas tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Cetak biru pengembangan SDM TNI perlu sinkronisasi dengan aspek ekonomi pertahanan. Saatnya memperbarui platform ekonomi pertahanan mengingat geopolitik global terus berubah. Menurut Britannica Encyclopedia, ekonomi pertahanan adalah manajemen ekonomi nasional terkait dengan dampak ekonomi dari belanja militer. Implikasi yang terkait dengan ekonomi pertahanan antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam atau luar negeri. Kemudian, pengaruh belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, serta efek stabilitas nasional global. Platform atau cetak biru ekonomi pertahanan yang sesuai dengan kondisi sekarang sangat

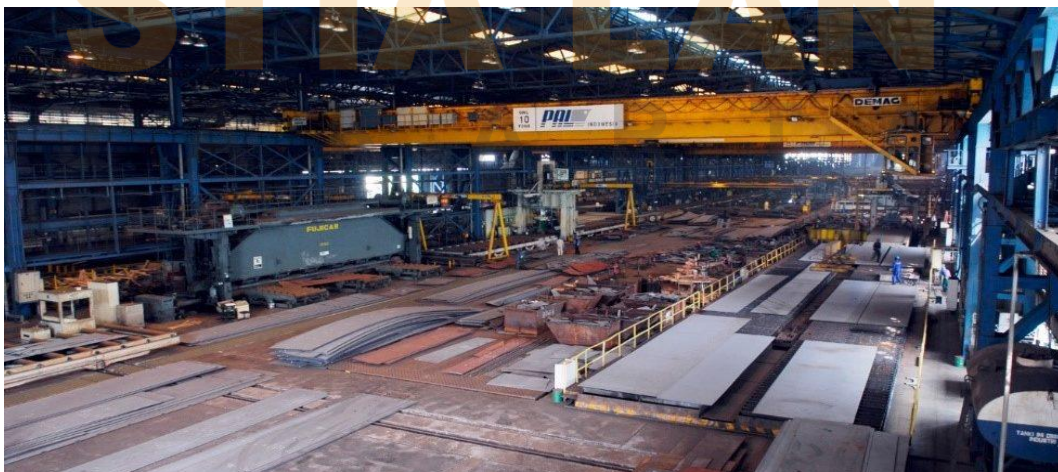
membantu agenda bela negara. Beberapa masalah yang masih mengganjal kedaulatan bangsa antara lain adanya kontrol sebagian ruang udara Indonesia oleh negara tetangga, Singapura.

Sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, TNI AL harus selalu siap sedia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia (*World Class Navy*) merupakan suatu visi dalam pembangunan kekuatan TNI AL. Terdapat 4 (empat) keunggulan yang menjadikan pilar kekuatan TNI AL yakni keunggulan sumber daya manusia (SDM), keunggulan alutsista, keunggulan organisasi dan keunggulan operasional.

SDM yang berkualitas merupakan salah satu pilar penting di dalam membangun kekuatan TNI AL, dibutuhkan personel TNI AL yang tidak hanya memiliki kompetensi profesional tetapi juga memiliki *sense of duty* dan *sense of honour* yang tinggi. Oleh karenanya seorang personel dituntut untuk dapat menguasai dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai dasar kompetensi profesinya yang pada gilirannya akan dapat mendorong tercapainya tugas – tugas yang diberikan kepada personel TNI AL. SDM merupakan faktor utama dalam mewujudkan keberhasilan tugas TNI AL. Dalam SDM terdapat Pembinaan karier personel TNI AL yang memegang peran kunci. Pembinaan karier, pada hakekatnya merupakan penggerak utama dinamika organisasi. Dengan demikian keberhasilan tugas TNI AL sangat dipengaruhi oleh pembinaan karier khususnya mengelola serta melakukan pembinaan kemampuan tiap personel yang mengawaki organisasi. Kemampuan yang meliputi

pelaksanaan tugas sehari – hari dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Personel TNI AL sebagai pengawak organisasi yang ditata secara benar, sinergis dan berkesinambungan didalam pembinaan karier yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan para personel di medan tugas dan operasi. Artinya, pembinaan karier tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan para personel untuk mendukung terlaksananya tugas yang diembannya. Dinamika organisasi saat ini melahirkan berbagai bidang penugasan yang menuntut adanya pengawak organisasi profesional yang memiliki kualifikasi sesuai bidang profesi tertentu diluar profesi dasar (korps). Berdasarkan dinamika tersebut perlu adanya upaya untuk mewujudkan personel yang profesional sesuai dengan korps dan profesinya melalui proses pembinaan karier yang sistematis, terarah dan berkesinambungan melalui pendidikan dan latihan serta pemberian pengalaman penugasan yang sesuai dengan profesinya dengan tetap memperhatikan kariernya.

Gambar 1.1. PT PAL Indonesia (Persero) merupakan industry Pertahanan Indonesia dalam pemenuhan MEF



Kekuatan Pokok Minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI AL secara utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas dan fungsi TNI AL dalam menghadapi ancaman serta tercapainya efek penangkalan yang tinggi. Penyusunan MEF dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan anggaran pertahanan yang dapat disediakan oleh pemerintah, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan kekuatan TNI AL dapat lebih realistis. Dalam penyusunannya, MEF dibagi menjadi tiga tahapan pembangunan dengan fokus pembangunan pada bidang organisasi, materiil/alutsista, personel dan pangkalan.

Program pembangunan MEF TNI AL saat ini telah memasuki tahapan kedua, di mana pada tahap pertama tahun 2010-2014 telah dilaksanakan pengembangan organisasi, personel, materiil/alutsista dan pangkalan yang secara umum baru tercapai 52,33% dari sasaran yang diharapkan pada akhir tahun 2014, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian pada bidang anggaran, pemenuhan alutsista serta tingkat kesiapan alutsista. Hampir sebagian besar alutsista TNI AL sudah berusia tua bahkan ada yang berumur di atas 73 tahun. Disamping itu, tingkat kesiapan alutsista baru juga belum pada kondisi siap tempur karena belum dilengkapi dengan senjata dan amunisi. Pembangunan MEF tahap II tahun 2015-2019 dan tahap III tahun 2020-2024 akan tetap dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional yang akan memunculkan berbagai tantangan sekaligus

ancaman baru, khususnya perubahan *balance of power*; antisipasi konflik teritorial terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya, kerja sama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, serta penanganan bencana alam.

Kebijakan pembangunan nasional saat ini yang menempatkan sektor kemaritiman sebagai tulang punggung perekonomian bangsa perlu didukung dengan membangun kekuatan pertahanan maritim yang disegani di kawasan, yang ditujukan bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Konsep ini memiliki konsekuensi kebutuhan postur pertahanan yang memiliki kekuatan dan kemampuan bukan hanya untuk melindungi wilayah teritorial dan ZEE Indonesia saja, namun juga mampu menjangkau wilayah yang lebih luas, mencakup kawasan regional dan global, termasuk Samudera Hindia dan Pasifik. Pelaksanaan pengadaan alutsista saat ini dilaksanakan oleh kedinasan yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya adalah Dinas Pengadaan Angkatan Laut (Disadal). Pengadaan alutsista yang bersifat utuh dilakukan secara terpusat baik dilaksanakan oleh Mabesal ataupun Kementerian Pertahanan sedangkan pengadaan yang bersifat bagian dari alutsista dilaksanakan oleh Kotama masing-masing dan tidak dilaksanakan secara terpusat dalam suatu kesatuan unit pemeliharaan untuk menjamin efektifitas pengelolaan pemeliharaan alutsista.

Gamabr 1.2. KRI dalam proses pembangunan di galangan kapal.



Dinas pengadaan TNI Angkatan Laut (Disadal) merupakan kedinasan didalam TNI Angkatan Laut yang memiliki tanggung jawab terselenggaranya pelaksanaan dan pembinaan pengadaan materiel alat utama dan materiel bekal di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasi. Dinas Pengadaan Angkatan Laut bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan pengadaan materiil alat dan materiil bekal di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Disadal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Merumuskan kebijakan teknis Kasal dalam bidang pengadaan materiil alat dan bekal khusus. 2) Merencanakan program dan kegiatan Disadal dalam bidang pengadaan materiil alat dan bekal khusus secara

berlanjut. 3) Mengembangkan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk di bidang pengadaan berdasarkan petunjuk pengadaan materiil TNI. 4) Melaksanakan pengadaan materiil alat dan materiil bekal sesuai dengan tingkat lingkupnya. 5) Menyelenggarakan pengendalian pengadaan materiil alat utama, materiil non alat utama dari luar negeri dan dalam negeri. 6) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 7) Mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi terkait di dalam dan di luar TNI Angkatan Laut. 8) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kepala Staf Angkatan Laut khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Kondisi saat ini struktur organisasi Dinas Pengadaan diisi oleh sumber daya manusia yang bermacam-macam sumber dengan tidak memperhatikan kesesuaian kompetensi personil tersebut dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Kompetensi personil Dinas Pengadaan Angkatan Laut harus menguasai mekanisme pengadaan barang/jasa terutama pada alat peralatan pertahanan dan kemanan, tuntutan tersebut sampai dengan saat ini belum terpenuhi seutuhnya, pada umumnya kemampuan pengadaan personil Dinas Pengadaan diperoleh dengan cara *learning by doing* dan hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan personil tersebut memahami arti dari perencanaan pengadaan, proses pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan penerimaan barang pengadaan yang cukup baik, dihadapkan dengan rotasi jabatan untuk penyegaran organisasi yang cukup singkat.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023, hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang ada di Dinas Pengadaan Angkatan Laut. Kualitas pengadaan personil Dinas Pengadaan rata-rata masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan tambahan yang akan mempermudah dalam melaksanakan tugas tanggung jawab jabatannya. Terdapat beberapa personil Dinas Pengadaan pada saat baru menempati jabatan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa hal tersebut mendorong pimpinan untuk memerintahkan personil tersebut melaksanakan kursus singkat tentang pengadaan barang/jasa di LKPP. Sehingga dengan kondisi personil seperti itu menjadi beban yang cukup besar bagi Dinas Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Kualifikasi pengadaan personil Dinas Pengadaan pada umumnya tidak didapatkan pada saat sebelum ditempatkan di Dinas Pengadaan.

Daftar Satuan Personil (DSP) Dinas Pengadaan masih belum terpenuhi, masih terdapat jabatan Dinas Pengadaan yang masih kosong sehingga secara kuantitas kebutuhan personil Dinas Pengadaan belum terpenuhi, dengan komposisi personil Dinas Pengadaan saat ini dan jumlah personil yang ada belum memberikan sumbangsih yang cukup baik terhadap pencapaian pengadaan alutsista yang sesuai dengan kebutuhan operasi dan cita-cita TNI Angkatan Laut secara utuh. Kriteria-kriteria jabatan yang ada tidak sesuai dengan kemampuan profesi dari personil pejabatnya, sampai dengan saat ini komposisi personil masih

diatur berdasarkan keseimbangan jumlah personil dari masing-masing bagian dengan tidak terlalu memperhatikan kemampuan profesi dari personil tersebut. Alhasil adalah personil tersebut harus mempelajari tugas dan tanggung jawab jabatannya tanpa memiliki dasar pendidikan yang kuat pada bidang tersebut.

Kesalahan administrasi dalam penulisan risalah pengadaan barang/jasa menunjukkan lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki suatu instansi, risalah pengadaan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pengadaan. Kesalahan penulisan pada risalah pengadaan biasa terjadi pada saat penulisan tanggal yang tidak sesuai dengan hari atau karena budaya masih mengandalkan *copy/paste* sehingga terkadang data pada file lama yang masih muncul pada penulisan risalah. Bahkan pada kondisi tertentu terjadi kesalahan penulisan angka yang bernilai rupiah, hal ini menjadi sangat merugikan semua pihak baik instansi Dinas Pengadaan sendiri maupun pihak calon mitra, dengan kesalahan penulisan angka akan sangat mempengaruhi terhadap hasil pengadaan itu sendiri hal ini cukup berbahaya karena secara hukum pihak penyelenggara proses pengadaan dapat digugat dan dituntut. Risalah pengadaan tidak terdokumen dengan baik yang mengakibatkan terdapat beberapa dokumen penting tidak pada tempatnya sehingga pada saat dibutuhkan sulit ditemukan, butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan dokumen tersebut. Dengan kondisi penataan dokumen yang buruk tersebut dihadapkan dengan banyaknya pengadaan alutsista yang diselenggarakan oleh Dinas Pengadaan ataupun oleh Kementerian Pertahanan yang diperuntukan TNI Angkatan Laut. Kesalahan administrasi pada risalah mengakibatkan banyaknya temuan-temuan auditor baik internal maupun

eksternal, sehingga merugikan instansi dan menunjukkan ketidakkompetennya instansi tersebut.

Kesalahan administrasi tidak hanya terjadi pada saat penyusunan risalah namun juga terjadi pada saat penyusunan kontrak pengadaan. Hal ini menjadi lebih berat karena kedudukan kontrak memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat berdasarkan aturan yang berlaku. Kesalahan-kesalahan penyusunan kontrak tidak jauh berbeda dengan penyusunan risalah, kesalahan penulisan sering terjadi terutama pada data-data baik tanggal, nilai kontrak, tempat penerimaan kontrak, sampai dengan nilai kontrak akibat dari kesalahan penyusunannya. Kesalahan pada kontrak berdampak buruk pada hasil pengadaan, kedudukan kontrak seolah-olah menjadi ikatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja antara kedua belah pihak. Ikatan sebuah kontrak sangat menentukan hasil pengadaan, jika terjadi kesalahan pada kontrak akan merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Definisi dan maksud dalam pasal-pasal kontrak tidak boleh multi tafsir harus memiliki satu arti yang dimengerti oleh kedua belah pihak, terkadang pasal-pasal dalam kontrak memiliki arti multi tafsir bahkan ada pula yang bertolak belakang antara satu pasal tertentu dengan pasal lainnya. Untuk merubah suatu kesalahan pada kontrak maka kedua belah pihak harus melaksanakan adendum kontrak dengan dasar data-data yang cukup kuat untuk melakukan perubahan serta dengan proses yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Menteri Pertahanan dalam Permenhan nomor 17 tahun 2014 menyebutkan persyaratan yang harus dimiliki oleh tim pokja pengadaan antara lain:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Pokja;
- f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Alutsista TNI sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- g. menandatangani Pakta Integritas.

Tabel 1.1.
Tabulasi Wasrik Itjenal di Disadal

NO	URAIAN PERMASALAHAN	REFERENSI/KRITERIA	REKOMENDASI
1	2	3	4
	Penyusunan Rencana Kegiatan Pengadaan Satu Unit Kapal BCM belum sesuai ketentuan Berdasarkan kriteria 1 pasal 1 angka 11 dinyatakan bahwa Operational Requirement yang selanjutnya disebut opsreq adalah jabaran dari tuntutan operasional alutsista TNI, dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan maneuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun	Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 35 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alutsista TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI	Agar Kadisadal memerintahkan staf pendukung PPK untuk mengklarifikasi terjadinya perbedaan antara Spesifikasi teknis Opsreq dengan Rencaa Kegiatan

	spesifikasi teknis. Hasil pendalaman terhadap Rencana Kegiatan dan Spesifikasi Teknis pengadaan Kapal BCM terdapat perbedaan Spesifikasi Teknis		
--	--	--	--

Sumber Tabulasi Hasil Wasrik Itjenal Tahun 2019

Tabulasi temuan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut setelah melaksanakan pendalaman materi hampir setiap tahun terjadi dengan permasalahan yang hampir relative sama yaitu kesalahan administrasi di level staf. Hal tersebut menunjukkan indikasi personil pengadaan yang masih kurang berkompeten dibidangnya.

Tabel 1.2.
Jawaban Surat Tim Wasrik BPK RI

NAMA PEKERJAAN	IDENTIFIKASI MASALAH & HASIL PEMERIKSAAN	TANGGAPAN, PENJELASAN & TINDAK LANJUT
2	3	4
Pengadaan <i>Submarine Command Team Trainer</i> (SCTT) Tahap 2 dari 3 Tahap nomor KTR/12/02-51/I/2016/ Disadal tgl 7 Januari 2016	Garansi pabrian yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan SSUK dan SSKK. PT Pusaka Strategik telah menyerahkan sertifikat garansi pabrian dari <i>Rheinmetall Defence</i> Nomor 2014-041_2016-20 tanggal 29 November 2017 dengan periode 12 bulan dan untuk <i>hardware</i> garansi selama 24 bulan. Dari sertifikat tersebut diketahui bahwa garansi yang berlaku selama 24 bulan (2 tahun) hanya untuk <i>hardware</i> sedangkan garansi selain <i>hardware</i> adalah selama 12 bulan saja. Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa masa garansi yang hanya 12 bulan tidak sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak pada angka 34.2.2, yakni masa	Pertimbangan Kadisadal selaku PPK menerima sertifikat garansi pabrian dari Rheinmetall Defence electronics GmbH (disingkat RDE) dengan periode 12 bulan dan untuk <i>hardware</i> 24 bulan sebagai berikut: a. Pada dasarnya garansi pabrian yang oleh PT Pusaka Strategik dari RDE sesuai dengan SSUK pada angka 34.2.2 yaitu sekurang-kurangnya yaitu 2(dua) tahun sejak tanggal serah terima pekerjaan, atau berakhir pada 29 Nov 2018, karena pada pengadaan SCTT tahap 2 pekerjaan <i>software</i> menyumbang 33,24% (Rp 26.396.000.000,- untuk 9 item kegiatan) dari nilai total kontrak (Rp 79.415.600.000,- untuk 19 item kegiatan) sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau secara keseluruhan pengadaan SCTT tahap 2 mendapat jaminan pemeliharaan berupa garansi pabrian selama 2(dua) tahun. b. Terkait garansi selain <i>hardware</i> (dalam hal ini <i>software</i>) hanya berlaku selama 12 bulan, karena untuk mengantisipasi kegiatan pengadaan SCTT tahap 3 yang sedianya direncanakan akan dilaksanakan pada awal TA 2017, sehingga apabila garansi <i>software</i> berlaku selama 24 bulan maka pekerjaan SCTT tahap 3 baru akan bisa terlaksana minimal pada akhir tahun 2018. Seperti diketahui bahwa pekerjaan <i>update</i> atau <i>upgrade</i> untuk <i>software</i> apapun tentu akan berimplikasi pada hilangnya

NAMA PEKERJAAN	IDENTIFIKASI MASALAH & HASIL PEMERIKSAAN	TANGGAPAN, PENJELASAN & TINDAK LANJUT
2	3	4
	berlakunya sertifikat garansi pabrikan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (serah terima pekerjaan) sampai dengan tanggal berakhirnya masa garansi, yakni selama 2 (dua) tahun. Kemudian pada Syarat-syarat Khusus Kontrak angka 5.1 disebutkan juga bahwa masa berlaku garansi pabrikan adalah sejak tanggal penyerahan pekerjaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak hasil uji fungsi dinyatakan diterima.	<i>warranty</i> jika dikerjakan sebelum habis waktu masa garansi dari pabrik, dimana hal tersebut tidak berlaku untuk modifikasi <i>hardware</i> selama tidak berpengaruh pada perubahan desain, materiil dan dioperasikan secara normal. c. Demikian pula untuk garansi pabrikan dari RDE pada pengadaan SCTT tahap 1 dimana berlaku 12 bulan dan 36 bulan untuk <i>hardware</i> sejak serah terima kepada end user . Sesuai kontrak nomor KTR/40/ 02-51/ V/2015 tanggal 15 Mei 2015 disebutkan bahwa jaminan pemeliharaan berupa sertifikat garansi pabrikan berlaku selama 3 tahun (TMT 10 Des 2015 s.d. 10 Des 2018) namun karena dilanjutkan dengan pengadaan SCTT tahap 2 yang diserahkan pada 4 Desember 2016, maka untuk garansi <i>software</i> pengadaan SCTT tahap 1 hanya berlaku selama 1 tahun.

Sumber Jawaban Surat BPK NO. 34/TIM-ALUTSISTA/AL/09/2017 TGL 26 SEPT 2017

Pemeriksaan oleh tim Badan Pemeriksa RI selalu dilaksanakan setiap semester per tahunnya dengan hasil temuan sering adanya kesalahan dalam penyusunan administrasi, bahwa BPK RI tidak pernah memberikan suatu toleransi terhadap apapun tentang hasil audit terutama menyangkut anggaran, sehingga walaupun kesalahan terjadi akibat kesalahan administrasi namun penilaian oleh BPK akan menunjukkan indikasi terjadinya kerugian walaupun tidak secara langsung kerugian negara.

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 17 tahun 2014 seiring dengan peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018 tentang pelaku pengadaan barang/jasa telah mengatur tentang pejabat pengadaan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;

- b. memiliki integritas dan disiplin; dan
- c. menandatangani Pakta Integritas.

Pada peraturan diatas menunjukan bahwa para pelaku pengadaan harus memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan serta memahami secara pasti tentang perencanaan, proses, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa pejabat pengadaan yang tidak memiliki sertifikat kompetensi pengadaan serta tidak memahami ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh personil pengadaan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan walaupun dengan alasan menyesuaikan kondisi ketersediaan personil dilapangan.

Tabel 1.3.
Daftar Personil Bersertifikat/Tidak Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pengadaan Angkatan Laut

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS/NRP	KET
	Militer Bersertifikat		
1.	Udyatmiko	Laksa TNI	
2.	Supriatno, M.Tr.(Hanla)	Kolonel Laut (T) 8925/P	
3.	Vendri Dwi Tjahyono, S.E., M.M.	Kolonel Laut (T) 10383/P	
4.	Jati Laksono, S.T., M.M.	Kolonel Laut (T) 11399/P	
5.	Aris Ruru Palulungan, S.T.	Kol Laut (E) 11421/P	
6.	Masnal Samian, S.H., M.Si.	Kolonel Laut (E) 12682/P	
7.	Agus Mujiburrochman, S.Sos.	Letkol Laut (S) 12923/P	
8.	Teguh Sudiyanto, S.H., M.Hum.	Letkol Laut (KH) 12993/P	
9.	Bambang Purwanto, S.E.	Letkol Laut (S) 13496/P	
10.	Deni Susanto, S.E.	Letkol Laut (T) 13876/P	
11.	Ayi Taufik, A. Md., M.Tr.Opsla	Letkol Laut (E) 14041/P	
12.	Jaya Sukmana, S.E., M.M., M.Tr. Hanla	Letkol Laut (T) 14376/P	
13.	Emil Syam, S.T., M.Tr.Hanla.	Letkol Laut (T) 15462/P	
14.	Robertus Ambarura, S.T., M.Tr.Opsla.	Mayor Laut (T) 14941/P	
15.	Toto Sugiyono, S.T.	Mayor Laut (T) 15080/P	
16.	Yudi Handoko, S.T.	Mayor Laut (T) 16061/P	
17.	Heru Wahyudi, S.T., M.T.	Mayor Laut (T) 16073/P	
18.	Ayatullah Tranuario Angali N, S.E	Mayor Laut (S) 16106/P	
19.	Antoni Basuki, S.T., M.M.	Mayor Laut (T)16199/P	
20.	Gandono Putro W, S.E., M.Tr.Opsla.	Mayor Laut (S) 16627/P	
21.	Arif Fadli, S.T.	Mayor Laut (E) 16623/P	
22.	Surahman, S.T.	May Laut (T)16702/P	
23.	Rofi Hidayatur Rakhman	Mayor Laut (T) 18708/P	

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS/NRP	KET
24. 25.	Pramono Sigit Raharjo, S.T. Catur Adi Nugroho, S.A.P.	Kapten Laut (T) 19208/P Kapten Laut (S) 19251/P	
	ASN Bersertifikat		
1.	Sri Resmiati, S.H., M.H.	Pembina IV/a 196501241993012001	
2.	Ir. Sri Utari, M.M.	Pembina IV/a 196807111994032004	
3.	Yadi K, S.E.	Pembina IV/a 196911021990021001	
4.	Triyono	Penata Tk.I III/d 196507241987031001	
5.	Sri Mulyati	Penata III/c 196408301988012001	
6.	Meysyuryetty	Penata III/c 196605051989012004	
7.	Mirza Yusuf	Penata III/c 196609191991021001	
8.	Oentoeng S	Penata III/c 196904041992011001	
9.	Agung Sucipto	Penata III/c 197402071993011002	
10.	Sunarno	Penda Tk.I III/b 197204201993021001	
11.	Endang Sri S	Penda Tk. I III/b 196906021991122001	
	Militer Tidak Bersertifikat		
1.	Agus Niswan, S.E.	Letkol Laut (S) 11308/P	3 Lebih
2.	Novi Heru Prasetyo, S.T.	Ltk Laut (T) 14530/P	1 kali
3.	Bahrul Agus Riyadi, S.T., M.Tr.Hanla.	Ltk Laut (E) 15485/P	-
4.	Ateng	May Laut (S) 15299/P	1 kali
5.	Edy Setiyo, S.Si.T.	May Laut (T) 15603/P	1 kali
6.	Niko Adhitama	May Laut (S) 17199/P	2 kali
7.	Surya Hendra J, S.T.	Mayor Laut (E) 17719/P	2 kali
	ASN Tidak Bersertifikat		
1.	Dwi Heru Deni R, S.E.	Penata Tk.I III/d 196703151991012001	2 Lebih
2.	Sri Widarti, S.E., M.M.	Penata III/c 197207021991122001	2 Lebih
3.	Sukarji	Penda Tk. I III/b 196606121988011001	2 Lebih
4.	Atiman	Penda Tk. I III/b 196801121991121001	2 Lebih
5.	Istiani	Penda Tk. I III/b 197110241991122001	2 Lebih
6.	Sri Widiarti	Penda Tk. I III/b 197108211997032003	2 Lebih
7.	Siti Kiranawati	Penda TK. I III/b 197503221997032001	2 Lebih
8.	Siti Rokhaya	Penda TK. I III/b 197410281998032002	2 Lebih

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS/NRP	KET
9.	Mujiono	Penda 197405041999011003	III/a 1 kali
10.	Evi Hernawati	Penda 197812041999032002	III/a 1 kali
11.	Ita Restuti, S.E.	Penda 197806302001122001	III/a 1 kali
12.	Subowo	Penda 196610191993031003	III/a 1 kali
13.	Elly Rivani, S.E.	Penda 197410112002122001	III/a 1 kali

Data diatas menunjukan bahwa terdapat 25 personil militer dan 11 personil ASN yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan personil yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa terdapat 7 personil militer dan 13 personil ASN. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas diperlukan suatu kompetensi personil yang jelas sebagai personil pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Pengadaan Angkatan Laut, dimana sampai dengan saat ini standar kompetensi untuk personil pengadaan masih belum ada. Penelitian ini akan membahas kompetensi dari personil pengadaan ditinjau dari aspek Manajerial, Sosial kultural dan Teknis sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut yaitu **“Bagaimana standar kompetensi Personil Dinas Pengadaan Angkatan Laut dari aspek manajerial, sosial kultural dan teknis?”**

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan tesis tentang standar kompetensi personil Dinas Pengadaan Angkatan Laut ini bertujuan untuk menyusun draft standar kompetensi yang harus dimiliki oleh personil TNI Angkatan Laut terutama personil yang berdinasi di Dinas Pengadaan Angkatan Laut.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir tentang standar kompetensi personil Dinas Pengadaan Angkatan Laut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan draft kompetensi personil yang lebih luas di lingkungan Dinas Pengadaan Angkatan Laut.

1. Akademis.

Dengan mengetahui standar kompetensi personil Dinas Pengadaan Angkatan Laut maka penetapan daftar susunan personil Dinas Pengadaan akan menjadi lebih tepat, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu sumber daya manusia terutama personil pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut.

2. Praktis

Dengan mengetahui standar kompetensi personil Dinas Pengadaan Angkatan Laut penetapan daftar susunan personil Dinas Pengadaan yang tepat, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan pimpinan TNI Angkatan Laut dalam menentukan penempatan personil Dinas Pengadaan dalam rangka pelaksanaan pengadaan alutsista yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya sehingga *Minimum Essential Forces* (MEF) dapat terwujud.